AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Lynda Rokhani[1], Davina Shafa Naura[2], Fazara Aspasari[3], Rintan Gitaria[4], Abdul Rohman[5]
[1-5)] Departemen Akuntansi, Universitas Sriwijaya

e-mail: 01031182429021@student.unsri.ac.id

Artikel Info

Sejarah Artikel:
Diterima: 11 Mei 2026
Selesai Revisi: 18 Juni 2026
Dipublikasi: Oktober 2026

Kata Kunci: *Akuntabilitas, keuangan desa, good governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan evolusi penelitian, mengidentifikasi tema-tema yang dominan, dan memahami keterkaitan antara transparansi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Data dikumpulkan melalui pencarian jurnal ilmiah di Google Scholar selama periode 2021–2025 dengan menggunakan istilah akuntabilitas, keuangan desa, dan *good governance*. Proses seleksi artikel menggunakan metode PRISMA, yang meliputi identifikasi, *screening*, penilaian kelayakan, dan pemilihan akhir artikel. Dari 38 makalah yang dikumpulkan, 7 dinyatakan memenuhi persyaratan inklusi dan dievaluasi secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh berbagai elemen penting, termasuk transparansi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan efektivitas sistem pemantauan. Transparansi telah menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meskipun pelaksanaannya sebagian besar masih bersifat administratif. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan pejabat desa, pengawasan yang tidak memadai, dan minimnya keterlibatan masyarakat tetap menjadi hambatan utama.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, keuangan desa, good governance.*

Abstract

This study seeks to delineate the evolution of research, identify prevailing themes, and comprehend the interrelations among transparency, community engagement, and accountability in village financial governance. Data were gathered through a search of scientific journals on Google Scholar throughout the 2021–2025 timeframe utilizing the terms accountability, village finance, and good governance. The article selection process utilized the PRISMA method, encompassing identification, screening, eligibility assessment, and final choice of articles. Of the 38 papers collected, 7 were determined to satisfy the inclusion requirements and were evaluated thematically. The research findings indicate that the accountability of village financial management is affected by various critical elements, including transparency, human resource quality, technological utilization, and monitoring system efficacy. Transparency has demonstrated its capacity to enhance public trust, albeit its execution remains predominantly administrative. Conversely, the restricted capabilities of village officials, inadequate oversight, and negligible community engagement persist as the primary impediments.

Keywords: *Accountability, village finance, good governance.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan divisi administratif terkecil di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Administrasi desa yang efektif akan mendorong peningkatan tata kelola. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa (Diansari, 2020). Peraturan ini memberikan yurisdiksi yang luas kepada desa untuk administrasi urusan pemerintahan dan keuangan, termasuk alokasi Dana Desa. Dana Desa merupakan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Daerah tingkat kabupaten/kota. Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan tata kelola desa, memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, mendorong pembangunan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk (Setio Utomo dkk., 2018). Pola penguatan fiskal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran dari waktu ke waktu. Statistik resmi dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada awal berdirinya pada tahun 2015, anggaran yang disetujui berjumlah Rp 20,67 triliun. Nilai nominalnya melonjak menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 71,19 triliun pada tahun 2020, dan stabil antara Rp 68 triliun dan Rp 71 triliun pada periode anggaran berikutnya hingga tahun anggaran 2026 (Nabila et al., 2025). Pengelolaan prinsip pelaporan keuangan merupakan kondisi yang menunjukkan kinerja seluruh aparatur dalam menjalankan tugasnya secara efektif serta mampu menghasilkan laporan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan (Pebrianto & Aulia, 2022).

Peningkatan alokasi Dana Desa mengimplikasikan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Ghozali & Krisna Hari, 2017). Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas operasional, kondisi keuangan, arus kas, serta penjelasan rinci terhadap setiap unsur yang tercantum dalam laporan (Ervina & Mardatillah, 2022). Pendanaan besar yang dikelola oleh masyarakat dan tuntutan tinggi akan pembangunan yang merata menimbulkan berbagai tantangan. Kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dapat mengakibatkan berkurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, potensi keuangan desa yang besar menimbulkan risiko anomali jika tidak disertai dengan penerapan norma transparansi dan pengawasan yang efektif (Setio Utomo et al., 2018). Dalam hal ini, *good governance* sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang muncul di sebuah negara (Nurhidayat, 2023). Dengan menekankan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan unsur yang sangat penting untuk mengelola keuangan maupun kinerja organisasi sektor publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Namun demikian, berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti terbatasnya pemahaman pejabat desa pada mekanisme dan aturan manajement keuangan, melemahnya sistem pemantauan, dan keterlibatan masyarakat yang rendah ketika mengawasi pemanfaatan Dana Desa (Thybah et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman kontekstual dan relevan tentang isu-isu dalam administrasi desa dengan menganalisis secara menyeluruh elemen internal yang memengaruhi pengelolaan dana. Hasil penelitian ini memungkinkan pemerintah desa untuk segera mengidentifikasi potensi kekurangan dalam sistem pengelolaan dana desa dan mengadopsi peningkatan berbasis data. Peningkatan ini dapat mencakup peningkatan kemampuan kepemimpinan, penyempurnaan budaya organisasi, dan penguatan kepatuhan terhadap peraturan sebagai langkah proaktif untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, transparan, inklusif, efektif, dan efisien di desa, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* (Puspita Rini et al., 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai penelitian sebelumnya melalui teknik tinjauan pustaka sistematis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dari sudut pandang *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi penelitian tentang pengelolaan keuangan desa dari waktu ke waktu dan untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang berulang kali dibahas dalam literatur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara transparansi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas sebagai komponen fundamental dari tata kelola desa yang efektif dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan menganalisis literatur yang relevan, termasuk karakteristik yang memfasilitasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kesenjangan penelitian yang belum banyak dibahas dalam penelitian lain, sehingga memberikan referensi untuk kemajuan penelitian di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan praktis untuk pengembangan kebijakan guna meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa di masa depan.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif *Good governance*: Tinjauan Literatur Sistematis Kerangka Teori".

KERANGKA TEORI

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjalankan pemerintahan, di mana para pejabat memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan setiap keputusan dan langkah yang mereka ambil kepada pihak yang telah memberi mereka amanah (Dasila, 2025). Pada tingkat desa, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan kuantitatif, melainkan juga tentang bagaimana perangkat desa bersikap terbuka, taat aturan, dan mampu menjelaskan secara gamblang kepada warga mengenai cara mereka mengelola uang desa (Karundeng et al., 2025).

Kepala desa melapor kepada Bupati/Walikota tentang bagaimana APBDesa dilaksanakan. Pada akhir setiap tahun anggaran, kepala desa melaporkan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kecamatan. Ini meliputi laporan keuangan, realisasi kegiatan, dan program desa (Karundeng et al., 2025).

B. Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola keuangan di tingkat desa merupakan satu kesatuan proses yang berkesinambungan, diawali dari langkah perencanaan yang matang hingga berakhir pada pelaporan tanggung jawab atas pemakaian anggaran (Hasniati, 2016). Proses ini melibatkan penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan, mencatat transaksi, penyusunan laporan, hingga penyampaian pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Dengan demikian, kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas kesuksesan ataupun kegagalan pelaksanaan tata kelola dan pembangunan desa terkait tercermin dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Setra et al., 2019). Pelaksanaan yang baik pada setiap tahapan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dana desa.

C. Good governance

Konsep *good governance* menjadi kerangka dasar dalam mencapai tata kelola yang unggul, termasuk mengelola keuangan desa. Konsep ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Penerapan *good governance* dipemerintahan desa dapat menekan serta meminimalkan potensi penyimpangan pada pengelolaan dana desa, sehingga pelaporan anggaran desa dapat disusun dan ditanggungjawabkan secara lebih baik (Mudhofar, 2022). Penerapan *good governance* diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pengurangan praktik korupsi serta penguatan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan Masyarakat (Nasir, 2025).

D. Hubungan Akuntabilitas, Keuangan Desa, dan *Good governance*

Secara konseptual, terdapat keterkaitan yang erat antara *good governance*, pengelolaan keuangan desa, dan akuntabilitas. Untuk mendorong pembangunan dan pengelolaan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak mungkin memisahkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dari penerapan prinsip *good governance* (Setio Utomo et al., 2018). Artinya, Semakin tinggi keterbukaan yang ditunjukkan, semakin nyata pula komitmen pemerintah desa pada prinsip *good governance*. Hubungan ini juga bisa dipahami melalui *agency theory* yang memaparkan bahwa pemerintah desa sebagai pihak yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya. Sektor publik dan *stewarship theory* saling terkait karena pemerintah desa dipandang mampu memikul tanggung jawab dan bisa diandalkan untuk mengoptimalkan layanan public (Baihaqi et al., 2023).

Selain itu, secara teoretis, *stewardship theory* memosisikan perangkat desa sebagai pengelola (pelayan) yang memiliki beban moral untuk menjaga dan menjalankan amanah keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi (Baihaqi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai hasil empiris yang terkait akuntabilitas dan transparansi untuk mengelola keuangan desa (Halid et al., 2025). Metode SLR dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam proses penelusuran, *screening*, serta analisis literatur secara terbuka dan dapat direplikasi, sehingga efektif dalam mengidentifikasi pola tematik serta tren penelitian yang relevan dengan perspektif *good governance* (Snyder, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel ilmiah pada Google Scholar dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kajian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada perspektif *good governance*. Pencarian literatur menggunakan kombinasi kata kunci seperti akuntabilitas, keuangan desa, dan *good governance*, dengan pembatasan pada artikel jurnal ilmiah periode 2021–2025 untuk menjaga kualitas dan keterlacakan sumber. Seleksi literatur dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari *screening* didasarkan judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan teks lengkap (*full-text screening*) untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Hasil seleksi menghasilkan 7 artikel jurnal yang memenuhi kriteria inklusi. Prosedur ini mencerminkan prinsip *systematic screening* dalam SLR guna meminimalkan bias dan meningkatkan transparansi penelitian.

Analisis data penelitian ini dijalankan dengan pendekatan analisis tematik pada artikel yang sudah melewati proses seleksi berdasarkan alur PRISMA. Diagram PRISMA *(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)* merupakan bagan alir yang digunakan untuk menjelaskan tahapan *screening* literatur dalam *systematic literature review*, mulai dari proses identifikasi hingga seleksi akhir, termasuk jumlah artikel yang dipertahankan maupun dieliminasi beserta alasan pengecualiannya (Fiqy Ramadhan & Zaidal, 2024). Setiap artikel kemudian dikaji secara kualitatif dengan menelaah konsep serta hasil yang relevan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *good governance*.

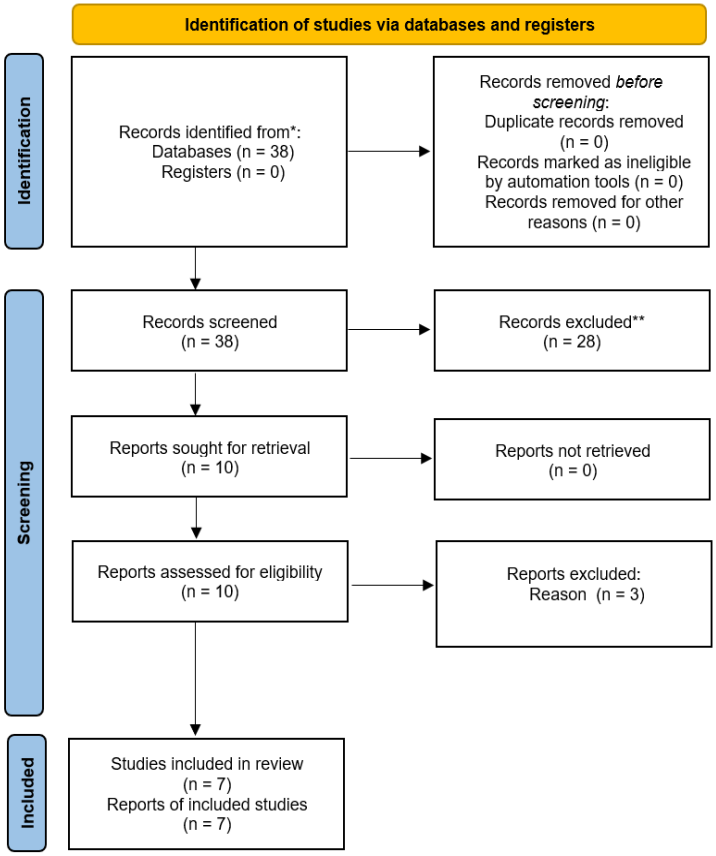
Selanjutnya, mengelompokkan hasil telaah literatur ke dalam beberapa tema berdasarkan kesamaan konsep, fokus pembahasan, serta keterkaitan makna yang ditemukan pada masing-masing penelitian. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses analisis dalam memahami hubungan antar penelitian sekaligus mengidentifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *good governance*. Setiap artikel kemudian dianalisis secara mendalam melalui perbandingan hasil penelitian guna menemukan kecenderungan pola, persamaan, maupun perbedaan hasil yang muncul pada setiap penelitian yang dikaji (Haddaway et al., 2022).

Selain itu, para peneliti menganalisis beragam temuan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan keterbukaan, akuntabilitas, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Para peneliti mengidentifikasi banyak kesamaan dalam temuan penelitian sebelumnya, termasuk tantangan yang dihadapi dan inisiatif yang dilakukan untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Semua hasil analisis kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan pembahasan yang logis, metodis, dan mudah dipahami. Akibatnya, penelitian kami menghasilkan hasil yang lebih menyeluruh dan objektif, berdasarkan data empiris yang diperoleh dari sumber literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan metode PRISMA melalui tahap identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion*. Pencarian literatur dilaksanakan di Google Scholar dengan kata kunci akuntabilitas, keuangan desa, dan *good governance* untuk memperoleh referensi yang relevan dengan topik penelitian. Artikel yang ditemukan tidak langsung digunakan, tetapi diseleksi secara bertahap berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi. Proses ini mengacu pada pedoman PRISMA agar pemilihan sumber berlangsung sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses *screening* dilakukan dengan mengacu pada PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sehingga tahapan dalam memilih sumber bisa dipaparkan secara terstruktur dan sistematis. PRISMA menyediakan standar yang terstandarisasi untuk mengumpulkan dan melaporkan hasil kajian literatur secara sistematis, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara transparan, jelas, serta memungkinkan pengulangan (Nurdiansyah & Veri, 2025). Metode ini membantu peneliti untuk menelusuri serta menentukan sumber literatur yang sesuai tujuan penelitiannya melalui empat tahap utama, yakni identifikasi (*identification*), *screening* (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penetapan akhir atau inklusi (*inclusion*) (Nasirudin et al., 2022). Dengan metode ini, peneliti bisa mengidentifikasi kesenjangan maupun keterbatasan penelitian terdahulu, memilih sumber yang sangat kredibel dan relevan, serta membangun sintesis teoretis yang lebih kuat dan terarah. Hasil yang didapatkan pun menjadi semakin valid dan bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan operasional dan strategis berbasis data empiris (Wiraspanggi & Veri, 2025). Pada tahapan ini, peneliti meninjau judul, abstrak, serta keseluruhan isi artikel secara komprehensif guna menjamin keselarasan dengan fokus penelitian. Seluruh rangkaian proses, mulai dari identifikasi sampai penentuan akhir artikel yang dianalisis, kemudian disajikan melalui PRISMA flow diagram.



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi literatur melalui proses penelusuran pada berbagai database ilmiah yang relevan dengan topik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *good governance*. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci yang telah disusun sebelumnya agar artikel yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan sebanyak 38 artikel yang berasal dari database ilmiah, sedangkan penelusuran melalui registri maupun sumber tambahan lainnya tidak menghasilkan artikel yang relevan sehingga jumlah artikel dari sumber tersebut tercatat nihil. Pada tahap identifikasi, peneliti juga melakukan proses seleksi awal untuk memastikan kualitas dan kelayakan literatur yang digunakan. Tahap identifikasi merupakan komponen vital dari metodologi *Systematic Literature Review* (SLR), karena mencakup pengumpulan semua literatur yang relevan sebelum prosedur pemilihan dan *screening* data (Armalina et al., 2025). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat artikel duplikat, tidak ada artikel yang dieliminasi secara otomatis oleh sistem, serta tidak ditemukan artikel yang harus dikeluarkan karena alasan tertentu. Dengan demikian, seluruh artikel yang diperoleh pada tahap awal dapat dilanjutkan ke tahap *screening* berikutnya.

Tahap selanjutnya mencakup evaluasi judul dan abstrak dari semua makalah yang dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan relevansi artikel dengan tujuan penelitian, khususnya dengan akuntabilitas, transparansi, pengawasan manajemen keuangan desa, dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam administrasi desa. Sebanyak 38 publikasi dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan relevansi tematik, cakupan penelitian, dan penekanan diskusi. Temuan *screening* mengungkapkan bahwa banyak publikasi gagal memenuhi persyaratan inklusi karena cakupan subjeknya yang sangat luas, kurangnya fokus khusus pada manajemen keuangan desa, atau kurangnya keterkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akibatnya, 28 artikel dikeluarkan selama tahap *screening*. Setelah melalui prosedur seleksi, 10 makalah diidentifikasi sebagai relevan dan selaras langsung dengan tujuan penelitian, sehingga layak untuk dianalisis pada tahap selanjutnya.

Pada tahap penilaian kelayakan (*eligibility*), yaitu proses evaluasi secara menyeluruh terhadap isi artikel melalui full-text review. Pada tahap ini, sepuluh artikel yang telah lolos *screening* ditelaah lebih mendalam untuk memastikan kesesuaian substansi penelitian dengan tujuan systematic literature review yang dilakukan. Peneliti menganalisis metode penelitian, fokus pembahasan, hasil penelitian, serta relevansi konsep yang digunakan dalam masing-masing artikel. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan tiga artikel yang tidak memenuhi kriteria kelayakan sehingga harus dikeluarkan dari proses analisis.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga artikel yang tidak memenuhi kriteria kelayakan dikeluarkan dari proses analisis dengan alasan: (1) Artikel tidak secara khusus membahas pemerintahan desa, melainkan lebih menitikberatkan pada organisasi sektor publik dan non-publik secara umum sehingga kurang sesuai dengan konteks penelitian; (2) Artikel lebih berfokus pada aspek teknis kualitas laporan keuangan dan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tanpa menghubungkannya dengan perspektif *good governance*; dan (3) artikel masih berupa draft laporan atau karya ilmiah yang belum melalui proses peer review sehingga belum memenuhi standar akademik yang memadai untuk dijadikan sumber utama dalam kajian literatur sistematis.

Tahap akhir, yaitu inklusi, penetapan artikel akhir yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan seluruh tahapan seleksi yang dilakukan secara bertahap dan sistematis, diperoleh sebanyak tujuh artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai layak digunakan sebagai sumber utama penelitian. Ketujuh artikel tersebut kemudian dianalisis secara lebih mendalam guna mengidentifikasi pola hasil, persamaan konsep, serta perbedaan hasil penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *good governance*. Artikel yang terpilih menjadi dasar dalam penyusunan sintesis literatur, pembahasan hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan penelitian. Seluruh proses identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion* dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA secara sistematis, transparan, dan terstruktur sehingga proses seleksi literatur dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta mampu meminimalkan potensi bias dalam pemilihan sumber penelitian.

Tabel 1. *Hasil penelitian*

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
1	MozinS. Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025)	"Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan *Systematic Literature Review*"	Artikel ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, akuntabilitas berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan, prosedur, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya transparansi

			dan akuntabilitas yang berjalan secara baik, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Sri Yulianti Mozin et al., 2025). Selain itu, penerapan prinsip *good governance* juga dinilai mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan berfokus pada peningkatan kinerja. Konsep tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan seperti *Agency Theory* dan *New Public Management* turut memberikan kontribusi dalam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Melalui penerapan prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Sri Yulianti Mozin et al., 2025). Walaupun demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan dan pengawasan keuangan daerah juga belum berjalan secara maksimal di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan prinsip tata kelola yang baik belum sepenuhnya dapat terlaksana secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi agar transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan

			keuangan daerah (Sri Yulianti Mozin et al., 2025).
2	Darmawati, D., Nirwana, N., & Nuraeni, N. (2025)	"Systematic Literature Review (SLR): Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah"	Artikel ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan kelembagaan. Walaupun Dana Desa dibentuk sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran desa. Lemahnya pengawasan serta keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi faktor yang sering menyebabkan pengelolaan dana desa rentan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, hingga praktik korupsi (Darmawati et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dana yang diberikan kepada desa belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem pengelolaan dan pengawasan yang memadai. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa masih cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti penyusunan laporan dan pemenuhan prosedur formal. Sementara itu, transparansi yang diterapkan di berbagai desa sering kali hanya bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memberikan akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa sehingga partisipasi publik dalam proses pengawasan belum berjalan secara optimal. Padahal, keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (Darmawati et al., 2025). Selain itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Inspektorat Daerah

			dinilai masih belum berjalan secara maksimal. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kompetensi pengawas, serta kurangnya independensi dalam pelaksanaan pengawasan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dana desa. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya *moral hazard* dan perilaku oportunistik dalam pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengubah orientasi pengelolaan keuangan desa dari sekadar memenuhi kewajiban administratif menuju akuntabilitas yang berbasis pada kinerja dan hasil pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Darmawati et al., 2025).
3	Halid, F., & Amaliah, T. H. (2025	"Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa: Sintesis Tematik Literatur"	Artikel ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan keuangan desa, di mana penerapannya cenderung terbatas pada aspek administratif dan formal sehingga belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas yang bersifat substantif. Berdasarkan sintesis terhadap 25 artikel, ditemukan bahwa kualitas tata kelola keuangan desa dipengaruhi oleh hubungan antara pemanfaatan teknologi terutama sistem keuangan desa (Siskeudes) kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta efektivitas pengawasan dan partisipasi Masyarakat (Halid et al., 2025). Pemanfaatan teknologi terbukti mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan ketepatan pelaporan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, keterbatasan kualitas SDM, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan

			pengelolaan yang akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi penggunaan teknologi, serta penguatan pengawasan dan partisipasi publik agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih efektif dan berpihak pada kepentingan Masyarakat (Halid et al., 2025).
4	Adi, I. W. T., & Gorda, A. N. S. R. (2024)	"Dinamika Akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dalam Perspektif *Good Governace*"	Artikel ini menunjukkan bahwa akuntabilitas BPKP Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mendukung *good governance* melalui pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan penguatan sistem pengendalian internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Hasil kajian menegaskan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kualitas SDM, independensi lembaga, koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi informasi (Adi & Rahayu, 2024). Meskipun BPKP berkontribusi besar dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, kompleksitas birokrasi, dan belum optimalnya sinergi dengan pemerintah daerah (Adi & Rahayu, 2024). Karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusi, profesionalisme auditor, dan optimalisasi pengawasan berbasis teknologi agar peran BPKP dalam mendukung *good governance* dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
5	Adelia, G., Agesta, A., Ratnasari, N., & Dewi, V. (2025).	"A Review of Village Financial Governance: Regulatory Harmonization And The Optimization Of Oversight To Achieve Accountability In Indonesia"	Artikel ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan belum selarasnya regulasi antara aturan mengenai pemerintahan desa dan sistem keuangan negara. Kondisi tersebut menyebabkan proses akuntabilitas, pelaporan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum dapat berjalan secara maksimal. Meskipun

			program Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pembangunan dan kapasitas fiskal desa, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala administratif maupun kelembagaan. Sistem pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban keuangan desa dinilai belum terhubung secara menyeluruh dengan sistem keuangan nasional sehingga proses pengawasan serta evaluasi penggunaan anggaran masih sering mengalami hambatan (Adelia et al., 2025). Pengawasan yang dijalankan oleh aparat pengawas internal pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, pihak kecamatan, maupun masyarakat masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, maupun penggunaan teknologi pengawasan yang belum berjalan secara efektif. Akibatnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum mampu mencegah terjadinya berbagai penyimpangan secara optimal (Adelia et al., 2025). Kerentanan terhadap penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi pada sektor pemerintahan desa juga masih menjadi perhatian penting dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggaran desa belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih terintegrasi melalui penyelarasan regulasi, penguatan sistem pelaporan keuangan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan keuangan desa. Dengan adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, efektif, serta mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Adelia et al., 2025).

6	Pertiwi, A. N., Semiwati, S., Permatasari, A. Y. R., Widatiningsih, N., Nurung, N., & Jalaludin, M. (2025)	"Peran Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi: Systematic Literature Review"	Artikel ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, melalui penyajian informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Berdasarkan hasil sintesis terhadap 18 artikel, ditemukan bahwa penerapan standar akuntansi seperti IFRS dan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pelaporan, keterbukaan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban organisasi (Pertiwi et al., 2025). Selain itu, digitalisasi dalam sistem akuntansi juga berkontribusi dalam memperkuat fungsi pengawasan serta mempermudah akses informasi bagi para pemangku kepentingan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang masih terbatas (Pertiwi et al., 2025). Oleh karena itu, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis dan regulasi, tetapi juga perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas institusional serta komitmen organisasi dalam menerapkan praktik akuntansi yang berkualitas.
7	Buulolo, P. (2024)	"Analisis Literatur Tentang Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Anggaran Untuk Optimalisasi Pembangunan Desa"	Artikel ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang cukup penting dalam proses penyusunan anggaran desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa. Keterlibatan BPD tampak melalui dukungannya terhadap penerapan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes (Buulolo et al., 2024). Peran aktif BPD juga dinilai mampu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sekaligus membantu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberadaan BPD turut mendorong proses

			pengambilan keputusan yang lebih terbuka melalui musyawarah dan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Walaupun demikian, pelaksanaan fungsi BPD masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, serta minimnya akses informasi terkait penggunaan anggaran desa (Buulolo et al., 2024). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga belum berjalan secara maksimal sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum sepenuhnya efektif. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD, penguatan kerja sama dengan pemerintah desa, serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat agar proses perencanaan anggaran desa dapat terlaksana secara lebih terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan (Buulolo et al., 2024).

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, tujuh publikasi yang dianalisis menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dari perspektif tata kelola yang baik, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting: transparansi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan yang efektif. Keempat pilar tersebut saling terkait dalam mendorong pembentukan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada masyarakat. Transparansi bukan hanya persyaratan administratif untuk menyampaikan laporan anggaran; tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan sosial terhadap pemanfaatan dana desa. Informasi yang mudah diakses memfasilitasi pemahaman publik tentang proses penganggaran, termasuk perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa. Meskipun demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi di berbagai desa sebagian besar masih bersifat formal dan administratif, yang dicontohkan dengan hanya menyebarkan laporan atau menampilkan informasi anggaran tanpa menjamin pemahaman publik tentang isi dan maksud informasi tersebut. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian pengelolaan dana desa masih kurang memadai.

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, karena masyarakat berfungsi baik sebagai penerima manfaat pembangunan maupun sebagai pemangku kepentingan yang berhak mengawasi tata kelola lokal. Selain transparansi, kualitas sumber daya manusia di kalangan pejabat desa merupakan faktor yang paling sering diteliti dalam berbagai penelitian. Kurangnya pemahaman tentang peraturan pengelolaan keuangan desa, keterbatasan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan, dan kekurangan kemampuan administrasi tetap menjadi hambatan signifikan untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada kesiapan pejabat desa untuk mengelola anggaran dengan profesionalisme dan akuntabilitas.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi, khususnya melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dapat meningkatkan organisasi administrasi, mempercepat pembuatan laporan, dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Efektivitas penerapan teknologi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Di beberapa desa, adopsi teknologi masih suboptimal karena kapasitas staf yang tidak memadai untuk mengoperasikan sistem dan sumber daya yang tidak mencukupi, termasuk konektivitas internet dan perangkat keras komputer. Akibatnya, peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan dan pendampingan merupakan langkah penting untuk memfasilitasi pelaksanaan manajemen keuangan desa digital yang lebih efektif.

Masalah kritis yang secara substansial memengaruhi akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah sistem pemantauan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan masyarakat masih suboptimal karena beberapa tantangan, termasuk koordinasi antarlembaga yang tidak memadai, keahlian pengawasan yang terbatas, dan otonomi kelembagaan yang berkurang (Setio Utomo et al., 2018). Situasi ini menciptakan potensi anomali, moral hazard, dan kegiatan korupsi dalam pengelolaan pendapatan desa. Korupsi yang meluas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menggarisbawahi ketidakcukupan sistem tata kelola regional yang memfasilitasi kejadian tersebut. Hal ini berkaitan dengan perumusan kebijakan yang melibatkan modifikasi kerangka pemerintahan di Indonesia pada era reformasi, yang diberlakukan melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, yang membahas transisi dari sentralisasi ke desentralisasi dalam tata kelola daerah (Ervina & Mardatillah, 2022).

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga masih rendah akibat terbatasnya akses informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penyelarasan regulasi, serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Dengan tidak adanya kontrol dan aturan yang kurang tegas terutama di Negara yang masih berkembang dengan beragam perbedaan kondisi daerah satu dan yang lain dengan pemerintah pusat, maka hal tersebut dapat menyebabkan munculnya korupsi daerah (Ervina & Mardatillah, 2022).

Akuntabilitas yang baik perlu didukung oleh transparansi yang bersifat substantif, kualitas aparatur desa yang memadai, pemanfaatan teknologi secara optimal, keterlibatan masyarakat, serta sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Sinergi antara pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan *good governance* di tingkat desa sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *good governance* dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, seperti transparansi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta efektivitas pengawasan. Transparansi menjadi unsur yang berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa, sementara kompetensi aparatur desa menentukan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai regulasi. Selain itu, penerapan teknologi seperti Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) turut mendukung peningkatan ketertiban administrasi dan ketepatan pelaporan keuangan desa.

Walaupun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan kemampuan aparatur desa, pengawasan yang belum berjalan maksimal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung tata kelola keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di tingkat desa masih memerlukan berbagai perbaikan agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih efektif, terbuka, dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan maupun evaluasi penggunaan dana desa. Penelitian ini diharapkan mampu berperan sebagai rujukan kademik dan sumber praktik yang komprehensif bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan, dengan memberikan bukti empiris, analisis kritis, dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola keuangan desa.

Dengan memanfaatkan metode yang rigor dan pendekatan multidisipliner, penelitian ini bertujuan mendorong penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan akurasi pelaporan keuangan di tingkat desa, sekaligus mengidentifikasi celah kelembagaan dan mekanisme pengendalian internal yang perlu diperbaiki. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi regulator dan pemangku kepentingan lokal dalam merancang intervensi kebijakan, pedoman operasional, dan program pelatihan yang menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan dana, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengarahan pengelolaan anggaran desa yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan kepentingan umum masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut secara berkelanjutan (tidak hanya dinikmati saat ini, tapi juga oleh generasi mendatang).

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, G., Agesta, A. R., Ratnasari, N. E., & P., V. D. (2025). A Review Of Village Financial Governance: Regulatory Harmonization And The Optimization Of Oversight To Achieve Accountability In Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*, 45–66.

Adi, I. W. T., & Rahayu, AAA. N. S. G. (2024). Dinamika Akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Bali Dalam Perspektif Good Governace. *Publikasi.Polije.Ac.Id*, *1*(4), 2024. https://publikasi.polije.ac.id/j-dinamika/article/view/5302

Armalina, V., Hera Pamungkas, W., Budi, I., & Sufiana. (2025). Kajian Sistematis Parameter Learning Analytics Sebagai Dasar Pengembangan Framework Evaluasi Learning Management System. *Jurnal Sains Informatika Terapan (JSIT)*, *04*(02), 400–408.

Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, *6*(1), 15–36. https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36

Buulolo, P., Siregar, B., Sibuea, N., Penelitian, P., Administrasi, I., Administrasi, F. I., Pembinaan, U., & Indonesia, M. (2024). *Analisis Literatur Tentang Pengaruh Badan*. 723–730.

Darmawati, Nirwana, & Nuraeni. (2025). Systematic Literature Review (Slr): Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Social and Economics Research*, *3(2)*(1), 123–138.

Dasila, R. A. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(1).

Diansari, R. E. (2020). *Analisis Implementasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model (Penelitian pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016)*.

Ervina, E., & Mardatillah. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, *8*(2).

Fiqy Ramadhan, A., & Zaidal, N. (2024). Data Mahasiswa Baru Untuk Strategi Promosi Program Penelitian Teknik Informatika (Penelitian Kasus : IIB Darmajaya). *Scientica (Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi)*, *2*, 243–250.

Ghozali, R., & Krisna Hari, K. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Penelitian Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)*.

Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, *18*(2). https://doi.org/10.1002/cl2.1230

Halid, F., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2025). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa: Sintesis Tematik Literatur. *Sebi : Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(2), 199–208. https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.4859

Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*.

Karundeng, R., Walandouw, S. K., & Lintong, D. N. (2025). Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Penelitian kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, *3*(1), 64–77. https://doi.org/10.58784/rapi.275

Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(1), 21–30. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763

Nabila, S., Khaddafi, M., Usman, A., & Yusra, M. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Penelitian Pada Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*.

Nasir, M. (2025). Implementasi *Good governance* dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, *4*(3), 468–478. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.82

Nasirudin, N. binti D. M., Majid, M. A., Husin, H. bin, & Rahman, K. A. A. (2022). Elemen Pendidikan Manhaj Rabbani menggunakan Analisis Kajian Literatur Bersistematik (SLR) Element of Rabbani in Education System : Systematic Literature Review ́. *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, *9*(1), 15–30.

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Nurdiansyah, A., & Veri, J. (2025). Peran Pesantren Dalam Membangun Jiwa Wirausaha Santri: Systematic Literature Review Berdasarkan Metodologi Prisma. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, *15*(2), 309–315. https://doi.org/10.35968/mpu.v15i2.1567

Nurhidayat, I. (2023). *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia* (Vol. 1, Number 1). https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40

Pebrianto, D., & Aulia, D. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengeluaran Kas Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler (Penelitian Kasus Pada Sd Al-Imam Islamic School Balikpapan). *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, *8*(2).

Pertiwi, A. N., Permatasari, A. Y. R., Widatiningsih, N., Nurung, & Jalaludin, M. (2025). Peran Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi: Systematic Literature Review. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(4), 579–589.

Puspita Rini, D., Faisol, & Nurdiwaty, D. (2026). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Penelitian pada Desa di Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, *12*(1).

Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 24–33. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531

Setio Utomo, K., Sudarno, & Suharto, D. G. (2018). *Analisis Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Analysis of Good governance in Village Financial Management*. *13*(1), 50–66.

Setra, A. M., Diana, N., & Afifudin. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dan Good Governance Terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sri Yulianti Mozin, Siti Nurcahyati Abdussamad, & Saputra, I. N. A. (2025). Peran Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review. *Journal of Governance and Public Administration*, *3*(1), 128–138. https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316

Thybah, U., Yuliana, L., & Hikmah Perkasa, D. (2024). *Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas*.

Wiraspanggi, E., & Veri, J. (2025). Systematic Literature Review Dengan Metode Prisma: Integritas Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan Organisasi Yang Efektif. *Journal of Science Education and Management Business*, *4*(3), 819–836. https://doi.org/10.62357/joseamb.v4i3.847